

Pengaturan Komodo Bond dilakukan agar juga memegang prinsip kehati-hatian.

**Dodi Budi Waluyo, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI**

## Forum Indonesia Afrika



Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersama Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (keempat kanan), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (keenam kiri), Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (kelima kiri) membunyikan genderang jime bersama para ketua delegasi negara-negara Afrika dalam pembukaan Forum Indonesia Afrika (IAF) 2018 di Nusa Dua, Bali, Selasa (10/4). Pertemuan dua hari tersebut diikuti oleh 53 negara Afrika untuk berdialog dengan Indonesia tentang berbagai isu terutama ekonomi dan perdagangan sekaligus menjajaki kerjasama antar negara peserta forum.

ANTARA/Nyoman Budhiana

## PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

# BI Akan Rilis Aturan Komodo Bond

JAKARTA. Bank Indonesia (BI) akan merilis aturan soal penerbitan Komodo Bond dalam waktu dekat. Lewat aturan itu, otoritas moneter ingin agar penerbitan surat utang itu tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dodi Budi Waluyo mengatakan, pengaturan atas penerbitan Komodo Bond akan sama seperti pengaturan utang luar negeri valas lain yang juga memegang prinsip kehati-hatian. "Jadi bagi siapapun meminjam utang luar negeri korporasi non bank, dia harus *hedging* 25%, jaga likuiditas rasio 75%, atau punya rating BB-. Pengaturan ini sama," katanya kepada KONTAN, Selasa (10/4).

Selain itu dalam beleid yang akan diterbitkan, BI juga akan menerapkan beberapa ketentuan lain untuk mengatur penerbitan Komodo Bond. *Pertama*, Komodo Bond boleh diterbitkan oleh siapa saja yang ingin menerbitkan surat utang rupiah di luar negeri.

*Kedua*, ketentuan soal tanggung risiko. "Contohnya, BUMN karya akan menerbit-

kan Komodo Bond dalam rupiah, namun lakukan *settlement* dalam dollar sehingga tidak terkena risiko nilai tukar dan yang menanggung risiko investor," katanya.

Namun sayang, Budi masih enggan untuk menjelaskan secara detail aturan dan kapan tanggal pasti penerbitan aturan tersebut.

Komodo Bond memang tengah menjadi andalan baru pemerintah dan BUMN untuk menggali dana pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Tercatat, beberapa BUMN besar sudah memanfaatkan instrumen ini untuk mendanai sumber pembiayaan.

*Pertama*, PT Jasa Marga Tbk. Akhir tahun 2017, perusahaan ini menerbitkan Komodo Bond dengan jangka waktu tiga tahun bernilai US\$ 295,7 juta atau Rp 4 triliun di Bursa Efek London.

Setelah Jasa Marga, langkah yang sama juga dilakukan oleh PT Wijaya Karya Tbk. Di bursa yang sama, pada awal tahun ini, mereka menerbitkan Komodo Bond senilai Rp 5,4 triliun.

Arsy Sucianingsih

# Penjualan Riil Maret 2018 Ekspansif

Pertumbuhan indeks penjualan secara riil masih melambat bisa menjadi sinyal pelambatan ekonomi pada kuartal 1 2018

## Ghina Ghalya Quddus

JAKARTA. Hasil survei penjualan eceran Bank Indonesia (BI) pada Februari 2018 menunjukkan kenaikan. Kenaikan itu tecermin dari pertumbuhan tahunan Indeks Penjualan Riil (IPR) sebesar 1,5% dibanding Februari 2017 (*yoy*). Pertumbuhan IPR Februari 2018, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang -1,8% (*yoy*).

"Peningkatan penjualan terjadi pada kelompok barang lainnya, terutama subkelompok komoditas sandang yang meningkat hingga 10,2% (*yoy*)," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman, dalam keterangan tertulis yang dikutip KONTAN, Selasa (10/4).

Penjualan eceran diperkirakan BI juga akan terus meningkat pada Maret 2018 dengan pertumbuhan sebesar 1,7% (*yoy*). Sudah dekatnya bulan Ramadan dan Lebaran membuat IPR Maret 2017 lebih banyak didorong oleh pertumbuhan penjualan kelompok barang lainnya, terutama subkelompok komoditas sandang yang diperkirakan tumbuh hingga 11,5% (*yoy*).

Selain subsektor sandang, pertumbuhan penjualan paling tinggi juga terjadi pada komoditas suku cadang dan aksesoris, dan komoditas makanan, minuman dan tembakau masing-masing sebesar 12,2% (*yoy*) dan 4,8% (*yoy*).

Namun, hasil survei juga mengindikasikan peningkatan tekanan kenaikan harga di tingkat pedagang eceran dalam tiga bulan mendarat atau sampai Mei 2018. Hal itu tercermin dari kenaikan Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) tiga bulan menjadi 164,0 dari bulan sebelumnya 155,1.

Tekanan harga diperkirakan

kembali menurun dalam enam bulan mendatang, atau usai perayaan Lebaran. "Sebagaimana terindikasi dari nilai IEH enam bulan mendarat sebesar 149,2 lebih rendah dari 161,5 pada bulan sebelumnya," ujar Agusman.

## Waspada konsumsi

Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, tren kenaikan laju penjualan eceran terkonfirmasi oleh tingkat keyakinan konsumen yang cukup stabil dalam kuartal I tahun ini. Ia mencatat, pertumbuhan tahunan penjualan

eceran menunjukkan tren kenaikan dalam tiga bulan terakhir ini dari awal tahun yang melemah 1,8% (*yoy*). Diperkirakan penjualan eceran akan meningkat menjadi 1,7% (*yoy*) per bulan Maret 2018.

Survei BI menunjukkan, penjualan riil pada bulan Maret 2018 diperkirakan masih akan terus ekspansif. Melanjutkan kinerja penjualan eceran pada Februari 2018 yang mengalami perbaikan. Secara bulanan (*mtm*), IPR Maret 2018 tercatat 207,5 atau tumbuh 3,7% (*mtm*), meningkat dari minus 1,7% (*mtm*).

"Optimisme konsumen ser-

ta tren kenaikan laju penjualan eceran ditopang oleh terkendalinya inflasi umum meskipun tren inflasi yang berasal dari *volatile food* cenderung meningkat," kata Josua kepada KONTAN, Selasa (10/4).

Menurut Josua, kenaikan tren penjualan eceran menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga cenderung stabil didukung terjaganya daya beli masyarakat. Apalagi pemerintah juga meningkatkan penyaluran bantuan sosial pada kuartal pertama tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Daya beli yang terjaga tersebut terindi-

kasi dari peningkatan upah riil buruh tani dan buruh informal perkotaan kecuali buruh bangunan," kata Josua.

Hanya saja jika dibandingkan per kuartal, maka rata-rata laju penjualan eceran pada periode Januari hingga Maret 2018 cenderung lebih rendah dari kuartal I-2017 dan kuartal IV-2017.

Hal itu terjadi karena perlambatan penjualan eceran untuk peralatan informasi dan komunikasi dan penjualan eceran makanan dan minuman. Penjualan eceran kuartal I-2018 ditopang oleh peningkatan laju penjualan ritel un-

tuk barang budaya dan rekreasi. "Dengan demikian, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan masih flat di kisaran 4,96%-5% pada kuartal I tahun ini," ujar Josua.

Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistingyansih menambahkan, pertumbuhan indeks penjualan riil secara tahunan masih melambat. Pada bulan Maret 2018 misalnya, diperkirakan akan tumbuh mencapai sebesar 1,7%. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Maret 2017 yang sebesar 4,2%. "Kalaupun bulan ini ada perbaikan walaupun tetap tur-

un," ujar Lana. Dikawatirkan menjadi sinyal perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2018

Menurut Lana dengan melihat pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang diperkirakan akan flat atau datar 4,85% atau paling tinggi 5,03%, maka konsumen tidak terlalu yakin dengan ketersediaan lapangan kerja ke depan.

"Saya lihat konsumsi masih harus diwaspadai, ini masih ada stagnasi, ada tren turun yang masih berlanjut. Ini harus benar-benar dijaga dengan baik," ujarnya.

## Pertumbuhan Tahunan Indeks Penjualan Riil Menurut Kategori (%)

Deskripsi	2017												2018		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar*
Suku Cadang dan Aksesoris	16,6	10,9	8,3	9,2	8,7	4,6	1,8	1,0	1,4	1,7	-0,4	-3,1	3,7	9,5	12,2
Makanan, Minuman & Tembakau	7,3	5,1	7,1	8,4	9,7	10,5	-0,3	7,9	7,6	9,9	7,8	8,1	2,0	4,9	4,8
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-9,9	-10,2	-10,7	-6,4	-0,8	1,0	-1,2	3,4	-0,1	4,3	5,8	4,3	4,0	-0,7	3,1
Peralatan Informasi dan Komunikasi	12,5	6,1	2,3	0,2	-3,8	-0,4	-2,5	-7,7	-6,5	-11,9	-4,8	-11,4	-12,7	-11,7	-13,3
Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	2,2	1,4	1,2	-4,6	-7,5	-4,9	-17,2	-9,7	-9,7	-9,5	-10,5	-13,5	-10,0	-4,1	1,1
Barang Budaya dan Rekreasi	7,8	2,0	3,5	4,6	10,3	3,0	4,6	3,7	-1,7	0,9	-1,8	0,3	3,1	5,6	4,2
Barang Lainnya	-14,4	-12,4	-9,2	-8,8	-4,0	5,3	-16,0	-2,8	-7,3	-4,8	-4,2	-6,2	5,0	16,2	15,5
- o/w Sandang	-8,7	-4,7	-3,3	-3,2	-0,6	15,7	-9,3	3,0	-1,6	0,0	2,2	-1,7	5,0	10,2	11,5
Pertumbuhan Tahunan	6,3	3,7	4,2	4,2	4,3	6,3	-3,3	2,2	1,8	2,2	2,5	0,7	-1,8	1,5	1,7
Indeks Penjualan Riil	207,2	197,1	204,0	206,5	214,3	232,4	209,9	202,1	201,2	202,3	206,7	219,5	203,5	200,0	27,5

\* Angka Sementara

Sumber: Bank Indonesia

## PERPAJAKAN

# Pemangkasan Tarif PPh UKM Difinalisasi

JAKARTA. Pemerintah berjanji untuk segera memberlakukan pemotongan tarif pajak penghasilan (PPh) final Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5%.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengatakan, aturan untuk menerapkan kebijakan tersebut saat ini tengah difinalisasi pemerintah.

"Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 46/2013 masih kami finalkan. Proses harmonisasinya sudah dilakukan di kantor Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Jadi mudah-mudahan bisa segera selesai dan kami proses administrasinya," kata Kepala BKF Suahasil Nazara usai rapat mengenai insentif perpajakan di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (9/4) malam.

Suahasil mengatakan, dalam revisi PP 46/2013 yang mengatur tarif PPh final UKM, pemerintah tidak akan mengubah ambang batas (*threshold*) UKM saat ini sebesar Rp 4,8 miliar per tahun.

Apakah terbitnya aturan ini akan menggerakkan masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh badan? Suahasil mengatakan bahwa pemerintah ingin agar aturan ini bisa diberlakukan secepatnya. Namun, soal kapan aturan ini ditetapkan,

Suahasil mengatakan, aturan ini akan dilakukan secara bertahap. "Di bulan berikutnya, wajib pajak (WP) langsung bisa bayar sesuai dengan tarif baru. Jadi itu berlaku secara berkala. Misalnya nanti aturan berlaku bulan Mei, ya sesudah Mei sudah bisa pakai aturan ini. Ini kan untuk acuan pembayaran PPh bulanan," ucapnya.

Kendati ada penurunan tarif, tapi Suahasil bilang, pemotongan tarif ini tidak dianggap pemerintah sebagai potensi kehilangan dari penerimaan negara. Sebab, hal ini dilakukan agar WP lebih mudah untuk patuh.

"Bukan potensi *loss*. Kami berikan insentif pajak ini supaya masyarakat bisa makin taat pajak. Kalau dengan tarif lebih rendah, dari yang tadinya 1% jadi 0,5%, artinya lebih mudah untuk lapor karena bayar pajaknya lebih sedikit," ujar Suahasil.

Kendati begitu, ia tak menampik bahwa di tahun-tahun pertama kebijakan ini diterapkan akan ada efek pengurangan bagi penerimaan pajak. Namun hal tersebut tak akan merisaukan pemerintah.

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Kemkeu Yon Aرسال sebelumnya juga mengatakan,

efek dari penurunan tarif PPh UKM tidak akan terlalu banyak. "Ya ada (pengaruhnya), tapi seperti ini tidak banyak," ucapnya.

Dengan demikian, maka efeknya ke penerimaan negara juga tidak begitu besar, seperti waktu pemerintah menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) jadi Rp 54 juta per tahun. "Kami menunggu dari BKF soal besaran akhir penurunan tarif tersebut, jadi bisa dihitung," ujar

Ghina Ghalya Quddus

**PT ERATEX DJAJA Tbk**  
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018. Sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, panggilan untuk Rapat yang mencantumkan agenda rapat akan diumumkan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 April 2018 pukul 16.15 WIB.

Formulir surat kuasa untuk menghadiri Rapat akan tersedia dalam situs web Perseroan [www.eratexco.com](http://www.eratexco.com).

Usulan mata acara rapat akan dimasukkan dalam acara Rapat apabila diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan untuk Rapat yaitu 20 April 2018 dengan disertai alasan, materi lengkap, dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Jakarta, 11 April 2018  
Direksi Perseroan

**BANK DINAR**  
PT BANK DINAR INDONESIA Tbk  
("Perseroan")

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") selanjutnya disebut "Rapat" Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Mei 2018  
Waktu : Pukul 11.00 s/d 14.45 (Waktu Indonesia Barat)  
Tempat : Ruang Olio-Elan, Hotel Alila Lantai 3  
Jl. Pecenongan Kav 7-17, Jakarta Pusat, 10120

Agenda RUPS Tahunan:

- Penyampaian Laporan Neraca & Perhitungan Rugi/Laba Tahun 2017 untuk mendapatkan persetujuan dan pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (*acquittal of de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan penguasaan dan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
- Penerimaan kembali gaji dan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris serta pemberian fasilitas lainnya.

Ketentuan Umum:

- Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, per tanggal 10 April 2018 pukul 16.00 WIB;
- Kuasa Kehadiran:
  - Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dalam hal anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan bertindak selaku penerima kuasa dalam Rapat, maka suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam penghitungan suara.
  - Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di Kantor BAE Perseroan, yaitu PT Ficomid Buana Registrar yang beralamat di Wisma Bumi Putera Lantai M Sulte No. 209, Jl. Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta.
  - Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum pada butir b diatas selambat-lambatnya 03 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 26 April 2018.
- Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
- Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
- Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir tepat waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- Ilman panggilan RUPS ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham.

Jakarta, 11 April 2018  
PT BANK DINAR INDONESIA Tbk  
Direksi